IMPLEMENTASI PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 DAN SISTEM KENEGARAAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM*

Abd A'la

Negara Kesatuan Republik Indenesia (NKRI) dalam mayoritas umat Islam Indonesia yang direpresentasikan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama adalah final. Keberadaan Negara yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 tidak perlu dipersoalkan atau diganggu gugat lagi. Salah satu alasan utamanya, Pancasila sebagai dasar Negara senyatanya mencerminkan nilai-moralitas luhur sebagai menjadi ajaran Islam.

Berdasarkan hal itu, masalah yang perlu dipersoalkan adalah bagaimana mempertahankan NKRI dan keberadaannya dapat memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan hakiki bagi rakyat Indonesia. Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia itu harus menjadi salah satu negara yang dapat mengembangkan peradaban untuk bangsa yang bermartabat, dan kehidupan yang damai, sejahtera, bermoral dan berkeadilan.

Untuk itu, Pancasila sebagai sumber moral bangsa dan Undang-Undang Dasar (UUD)1945 sebagai penjabarannya mutlak untuk dibumikan dalam kehidupan. Nilai-nilai yang ada dalam Dasar Negara ini perlu dijabarkan dan dikontektualisasikan ke dalam kenyataan yang dialami dan dijalani bangsa. Dalam ungkapan lain, nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan yang dapat mentransformasikan menuju bangsa, masyarakat, dan warga yang modern, maju, dan memiliki jati diri dan kepribadian yang kokoh.

Nilai-Nilai Luhur Pancasila

Pancasila tidak diragukan lagi mengandung nilai-nilai luhur yang merujuk kepada ajaran agama (khususnya Islam), kearifan lokal masyarakat, dan budaya agung bangsa. Dari sila-sila yang ada, dan pasal-pasal UUD 1945, bangsa Indonesia memiliki komitmen bagaimana mereka harus menjadi bangsa yang religius, tapi sekaligus tidak terjebak ke dalam negara agama yang hanya menjadikan simbol-simbol agama sebagai alat kepentingan kelompok dan sejenisnya.

Hal semacam itu tampak jelas ketika keberagamaan bukan sekadar memperkuat kesalehan individual yang bersifat vertikal, tapi menuntut masyarakat Indonesia mengembangkan kesalehan sosial yang dapat menjaga hubungan horizontal yang harmonis dengan sesama dan alam lingkungan. Karena itu, pengembangan keadilan merupakan kondisi

* Disampaikan pada Temu Pakar/ Tokoh Daerah dengan tema "Implementasi Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, dan Sistem Kenegaraan Indonesia" yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Hotel Santika Pandegiling, Surabaya, tanggal 26 Agustus 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak bisa ditawar-tawar untuk dilabuhkan ke dalam kehidupan. Keadilan semata tidak cukup, yang perlu diperkokoh adalah keadilan substantif yang penuh keadaban yang menghormati hak-hak yang melekat pada individu, masyarakat, dan alam sekitar.

Nilai-nilai luhur lain tampak pada pengakuan kepada kemajemukan yang ada pada bangsa Indonesia. Kemajemukan sebagaimana merupakan salah satu nilai dalam Pancasila mutlak dirawat. Keanekaragaman perlu dijadikan modal yang akan memperkaya perspektif dan memperluas bangsa. Melalui modal itu, bangsa harus tetap bersatu mengemban visi dan misi negara yaitu terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh bangsa Indonesia.

Untuk mengemban itu, bangsa Indonesia –sebagaimana terdapat di sila lainnya pada Dasar Negara Indonesia itu –mengedepankan permusyawaratan. Kepentingan umum, kepentingan bangsa harus didahulukan dari kepentingan pribadi, kelompok, dan sejenisnya. Lebih dari itu, permusyawaratan yang dikembangkan adalah musyawarah yang sarat dengan kearifan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Melihat nilai-nilai yang dikandung Pancasila itu, terlihat jelas bahwa bangsa ini memiliki tekad yang pantang menyerah untuk hidup sederajat, dan setara seperti bangsa-bangsa maju yang lain. Namun kemajuan yang akan digapai jangan sampai melunturkan kepribadian dan jati diri bangsa. Bangsa Indonesia harus maju dan tetap berkarakter.

Pada sisi itu Islam sepenuhnya mendukung. Ajaran untuk menjadi umat atau bangsa yang terbaik, dan membangun negeri yang gemah riph loh jinawi, yang selalu berada dalam lindungan Tuhan tergambar jelas dalam pandangan bangsa.

Impelementasi Pancasila dan Turunannya

Untuk mewujudkan mimpi agung sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 itu, maka hal itu harus diimpelementasikan ke dalam sikap dan tindakan setiap warga, seluruh masyarakat dan bangsa. Untuk menjamin pencapaian hal itu, sistem kenegaraan dan segala perundang-undangan, dan segala peraturan di bawahnya harus merujuk dan mencerminkan nilai-nilai tersebut.

Sejalan dengan itu, internalisasi nilai-nilai tersebut sudah harus dilakukan secara sistematis dan sedini mungkin bagi setiap individu, dan kemudian dieksternalisasikan ke dalam lembaga dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Pendidikan memainkan peranan penting untuk melakukan itu. Pendidikan tidak bisa sekadar bersifat pengajaran. Pendidikan tidak bisa dimaknai hanya terbatas di sekolah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan harus melibatkan dan bahkan intrinsik berada dalam keluarga, masyarakat, dan negara, selain di sekolah itu sendiri dan lembaga formal pendidikan lainnya.

Hal lain yang sangat urgen untuk dikedepankan adalah kita harus berani mempertanyakan, apakah seluruh institusi, dan lembaga yang ada di negeri sudah menganut, mencerminkan dan mengawal nilai-nilai itu? Apakah lembaga politik kita, pranata sosial, lembaga kebudayaan, perekonomian dan lainnya sudah berada dalam bingkai kokoh Pancasila? Jika jawabannya sudah, pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana nilai-nilai itu terwujud konkret dalam visi, misi, tujuan dan sebagainya dari institusi-instusi yang ada itu.

Namun jika jawabannya belum, kita harus menemukan akar masalah yang menjadikan hambatan dan kendala. Di sini kita niscaya memotong akar persoalan itu dengan tetap mengedepankan kearifan, dan melalui strategi yang holistik dan komprehensif

Pada sisi itu diskusi tentang penguatan sistem presidensiil, penataan sistem perekonomian Nasional berbasis Demokrasi Pancasila, penguatan sistem demokrasi Pancasila dan lain-lainnya sebagaimana diusung oleh Bakesbangpol pada kegiatan ini menjadi signifikan untuk dilakukan secara intensif, dan berkelanjutan©.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id